



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Tupo bin Sirin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Beriga, RT.007/RW.002, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Ida binti Tegu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Beriga, RT.007/RW.002, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 19 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt, pada tanggal 06 Maret 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Air Nangka, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam, dengan wali nikah adalah Tegu bin Suropardi (ayah kandung) Pemohon II, dengan Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Beriga, RT.007/RW.002, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyaperkawinan Pemohon I (**Tupo bin Sirin**) dengan Pemohon II (**Ida binti Tegu**) yang dilaksanakan di Desa Air Nangka, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim pemeriksa perkara telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim pemeriksa perkara di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Tupo bin Sirin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah NIK 1904060402090001, tanggal 03 September 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Tupo bin Sirin dan Ida binti Tegu, Nomor : B-110/Kua.29.06.06/OT.01/03/2020 tanggal 04 Marewt 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Winarsih** dan **Napsiah** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Winarsih.

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Aik Nangka Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tegu dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon;
- -Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

2. Napsiah.

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Aik Nangka Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tegu dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan buku nikah;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, dan memohon Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh buku nikah Sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Aik Nangka Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tegu dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi KK atas nama **Tupo bin Sirinyang** dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, kedua bukti *a quo* adalah identitas Pemohon I, dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil Kabupaten Belitung Timur, yang membuktikan para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tegu dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, serta yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003, menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tegu dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Sumitro bin Jemait dan Butun bin Sani, **namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur;**
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai **bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan Sebagai syarat pembuatan buku nikah para Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 1 dan 2 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", dan dalam Pasal 36 Undang-Undang *a quo* yang berbunyi "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma Pasal *a quo* dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum dan patut dikabulkan, maka memenuhi maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan guna kepentingan pencatatan administrasi kependudukan jo Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hakim pemeriksa perkara menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA yang mewilayahi domisili hukum para Pemohon, yang untuk selanjutnya para Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan **Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**Tupo bin Sirin**) dengan Pemohon II (**Ida binti Tegu**) yang dilaksanakan di Desa Air Nangka, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2003;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada KUA Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat oleh Hakim yang bersidang, **Ansori, S.H., M.H.** pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim yang bersidang tersebut dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim yang bersidang,

Ansori, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.176.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0060/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)